

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN JEMBER**

***THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE IN IMPROVING THE ECONOMIC
WELFARE OF COASTAL COMMUNITIES IN THE DISTRICT OF JEMBER***

Dita Febriyana Putri¹, Syamsul Hadi² & Fefi Nurdiana²
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: ditafepe@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa tersebut. BUMDES didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Tujuan penelitian untuk: (1) Memahami peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember. (2) Mengetahui seberapa besar peran BUMDES terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember. (3) Mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk mengembangkan BUMDES masyarakat pesisir di Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan metode deskriptif, survey, dan kualitatif. Metode analisis data adalah analisis SWOT dan uji T berpasangan. Hasil penelitian adalah: (1) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di wilayah pesisir Kabupaten Jember belum maksimal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (2) Keberadaan BUMDES di wilayah pesisir Kabupaten Jember tidak terlalu berarti dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dilihat dari hasil uji T bahwa $P > 0,05$ yakni 0,304 yang artinya bahwa adanya BUMDES di desa-desa tersebut tidak terlalu membawa dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di kabupaten jember (3) Berdasarkan hasil Analisis SWOT, BUMDES wilayah pesisir di Kabupaten Jember berada pada posisi/kuadran IV (*Devensiff*). Posisi ini menandakan sebuah usaha yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi ancaman dan kelemahan internal.

Kata Kunci: BUMDES, Masyarakat Pesisir, SWOT, Peran, Kesejahteraan Ekonomi.

ABSTRAK

*One of the government's efforts to improve the economy of rural communities is to establish a village-owned enterprise (BUMDES). BUMDES is an institution specifically established to help increase the village's original income. BUMDES was established and managed by the community and village government. The research objectives are to: (1) Understand the role of BUMDES in improving the economic welfare of coastal communities in Jember Regency. (2) Knowing how big is the role of BUMDES in the economic welfare of coastal communities in Jember Regency. (3) Describe the strategies used to develop the BUMDES of coastal communities in Jember Regency. The research uses descriptive, survey and qualitative methods. Data analysis methods are SWOT analysis and paired T test. The results of the study are: (1) The role of village-owned enterprises (BUMDES) in the coastal area of Jember Regency has not been maximized in helping to improve the economic welfare of the community. (2) The existence of BUMDES in the coastal area of Jember Regency is not very significant in improving the economic welfare of the community. Seen from the T test results that $P > 0.05$ which is 0.304 which means that the presence of BUMDES in these villages does not have a significant impact on the economic growth of coastal communities in the district of Jember (3) Based on the results of the SWOT Analysis, BUMDES of the coastal areas in the Regency Jember is in position / quadrant IV (*Devensiff*). This position indicates a very unprofitable business, the company faces internal threats and weaknesses.*

Keywords: BUMDES, Coastal Communities, SWOT, Role, Economic Welfare.

PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi desa ditambahkan pada UU Nomer 22 tahun 1999 kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDes yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak desa yang mendirikan BUMDes berorientasi pada pemberian dana berguna.

Tujuan penelitian untuk: (1) Memahami peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember. (2) Mengetahui seberapa besar peran BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember. (3) Mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes masyarakat pesisir di Kabupaten Jember.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode survey adalah cara pengumpulan data dari sejumlah individu dalam jangka waktu tertentu secara bersamaan serta melakukan wawancara langsung terhadap petani responden (Nazir, 2003).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pemilihan lokasi Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan bahwa daerah pesisir di Kabupaten Jember yang meliputi daerah Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong, dan Kecamatan Gumukmas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan, dan pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) dengan pihak BUMDes dan pihak yang terkait dengan judul, maupun dari para pakar. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari laporan-laporan berkala atau tahunan, jurnal-jurnal, buku-buku, studi kepustakaan dan publikasi penelitian penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Balai Penyuluhan dan berbagai literatur yang mendukung penelitian ini.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan bertemu itu sesuai dengan sumber data. Peneliti menggunakan metode *accidental sampling* karena dari keseluruhan BUMDes tidak memiliki data masyarakat yang mengakses unit kegiatan BUMDes. Sampel yang digunakan untuk rumusan masalah ke tiga, peneliti mengambil responden ahli sejumlah 12 orang diantaranya 9 orang dari pengurus BUMDes dan 3 orang dari perangkat desa.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, data ini berkaitan dengan profil perusahaan, kelebihan, kelemahan perusahaan, dan lain sebagainya.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum data dianalisis, terlebih dulu data diolah dengan melakukan tabulasi data primer dari kuesioner agar data lebih mudah dipahami. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Analisis kualitatif juga digunakan untuk menggambarkan keadaan umum lokasi penelitian. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur besarnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

1. Untuk menjawab tujuan pertama yaitu memahami peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember maka, digunakan metode deskriptif. Metode Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum, keadaan sekitar secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat yang

berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Uji Normalitas penting diketahui karena berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang digunakan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung perbedaan pendapatan masyarakat pesisir saat sebelum dan setelah adanya BUMDes. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan nilai asymp signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 diterima
2. Jika nilai asymp signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak
3. Uji Wilcoxon untuk menjawab tujuan kedua yaitu mengetahui seberapa besar peran BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember Uji Wilcoxon merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda (Pratama, 2012). Uji Wilcoxon digunakan apabila data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji Wilcoxon adalah sebagai berikut (Sutiarso, 2015)

1. Apabila $H_0: D_i \leq 0$ atau $H_0: T(+) \leq T(-)$, maka :
Tolak H_0 pada α tertentu jika besarnya $T(-)$ lebih kecil dari d untuk n dan α yang ditabulasikan, atau
Apabila $T(-) < T(\alpha)$: tolak hipotesis nol.
2. Apabila $H_0: D_i \geq 0$ atau $H_0: T(+) \geq T(-)$, maka :
Tolak H_0 apabila α tertentu jika besarnya $T(+)$ lebih kecil dari d untuk n dan α yang ditabulasikan, atau
Apabila $T(+) < T(\alpha)$: tolak hipotesis nol.

Keterangan : nilai $\alpha = 0,05$

4. Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu mendeskripsikan strategi yang digunakan

untuk mengembangkan BUMDes masyarakat pesisir di Kabupaten Jember, peneliti menggunakan Analisis Swot. Menurut Rangkuti (2006), analisis SWOT adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara matematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

BUMDes atau Badan Usaha milik Desa didirikan guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk badan hukum BUMDes tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun koperasi, yang dimana kesemuanya mendapatkan status sebagai badan hukum saat mendapat pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara jelas saat mana BUMDes sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari pasal 88 UU Desa dan pasal 132 PP desa yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dan dengan ditetapkan dengan peraturan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan desa, maka saat itulah BUMDes telah lahir sebagai badan hukum.

Dalam Tabel 6.1 disajikan profil BUMDes pada wilayah pesisir di Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Profil Badan Usaha Milik Desa Wilayah Pesisir Kabupaten Jember Tahun 2020

No	Nama BUMDes	Desa Cangkupan	Kecamatan	Nama Ketua	Jumlah Pengurus	Surat Keputusan	Jumlah Bidang
1	Paseban Agung	Paseban	Kencong	Suhartono	8	Sudah	2
2	Mekar Jaya	Mojosari	Puger	Abdul Wahid	3	Sudah	1
3	Mulyorejo	Kepanjen	Gumukmas	Ponidi	3	Belum	3
4	Sejahtera	Puger Kulon	Puger	Mashudi	6	Sudah	4
5	Sejahtera	Sumberejo	Ambulu	Muslimin Junaedi	3	Sudah	2
6	Sido Mekar	Mojomulyo	Puger	Adi Purnomo	3	Belum	1
7	Mitra Usaha	Andong Rejo	Tempurejo	Sumardi	3	Sudah	1
8	Sido Makmur	Curah Nongko	Tempurejo	Kriss	2	Sudah	2
9	Pesona Harapan	Puger Wetan	Puger	Raharjo	5	Belum	2

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa terdapat 9 BUMDes pada wilayah pesisir Kabupaten Jember dengan jumlah pengurus dan jumlah bidang yang berbeda-beda. Dilihat dari tabel di atas terdapat 3 BUMDes masih belum memiliki SK (Surat Keputusan) yakni Mulyorejo, Sido Mekar dan Pesona Harapan dan 5 lainnya sudah memiliki SK (Surat Keputusan). SK (Surat Keputusan) BUMDes

diurus langsung oleh pemerintah desa pada masing-masing wilayah.

Tiga desa yang belum memiliki SK (Surat Keputusan) disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda tiap desa. BUMDes Mulyorejo di Desa Kepanjen belum memiliki SK (Surat Keputusan) karena baru saja ada pergantian kepengurusan jadi belum ada SK (Surat Keputusan) baru. Sebenarnya dari kepengurusan lama SK (Surat

Keputusan) pun belum terbentuk jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pihak desa yang terkesat lambat dalam mengurus berkas-berkas penting dari BUMDes. BUMDes Sido Mekar di Desa Mulyorejo juga belum memiliki SK (Surat Keputusan) bahkan BUMDes ini baru berjalan di tahun pertama. Hingga saat ini tidak ada pergerakan lagi dari BUMDes. Jadi pihak BUMDes dan pihak desa tidak maksimal untuk mengembangkan BUMDes. Dan yang terakhir BUMDes Pesona Harapan yang juga belum memiliki SK (Surat Keputusan) masalah yang dihadapi BUMDes ini sama dengan BUMDes di Desa Kepanjen yakni kinerja pihak desa yang lambat dalam mengurus berkas-berkas penting.

Paseban Agung memiliki jumlah pengurus paling banyak dengan 8 orang pengurus dengan 2 bidang yakni bidang usaha dan bidang pariwisata. BUMDes Sejahtera pada desa Puger Kulon memiliki 6 jumlah pengurus dengan 4 bidang yaitu bidang pariwisata, bidang perikanan, bidang

kesehatan, dan bidang kewirausahaan. Jumlah pengurus paling sedikit terdapat pada BUMDes Sido Makmur dengan 2 orang pengurus dan 2 bidang yaitu kerajinan dan wirausaha. BUMDes lainnya rata-rata terdiri dari 3 orang pengurus dan jumlah bidang yang berdeba-beda pada masing-masing BUMDes tersebut. Ada beberapa kemiripan bidang-bidang yang dijalankan oleh BUMDes. Bidang-bidang tersebut meliputi bidang wirausaha, bidang wisata, bidang kesehatan, bidang peternakan, dan bidang pertanian.

Dalam penelitian ini perangkat desa juga dilibatkan sebagai responden. Perangkat desa yang dipilih merupakan perangkat desa yang paham tentang BUMDes. Dari keseluruhan desa hanya diambil 4 perangkat desa yang dianggap sudah mewakili jawaban dari keseluruhan desa di wilayah pesisir Kabupaten Jember. Profil perangkat desa ditampilkan pada Tabel 6.2.

No	Nama	Umur (thn)	Pendidikan		Jabatan	Alamat	Kecamatan
			Jenjang	Tahun			
1	Misbahul Munir	38	SMA	12	Sekretaris Desa	Kepanjen	Tempurejo
2	Riyadi	35	SMA	12	Sekretaris Desa	Puger Wetan	Puger
3	Zakariya	36	S2	18	Sekretaris Desa	Paseban	Kencong

Pada penelitian ini membutuhkan data dari beberapa masyarakat guna untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Masyarakat yang menjadi sasaran adalah yang ada hubungannya dengan segala unit kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes. Seperti dijelaskan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.3 Profil Responden Masyarakat Pesisir Kabupaten Jember Tahun 2020

No	Nama	Umur (thn)	Pendidikan		Pekerjaan Utama	Alamat	Kecamatan
			Jenjang	Tahun			
1	Hermanto	47	SMP	9	Peternak	Kepanjen	Gumukmas
2	Supeno	55	SMP	9	Peternak	Kepanjen	Gumukmas
3	Solihah	56	SD	6	IRT	Mojosari	Puger
4	Rum	50	SD	6	IRT	Mojosari	Puger
5	Tutik	52	SD	6	IRT	Mojosari	Puger
6	Paitun	50	SD	6	Pedagang	Paseban	Kencong
7	Zakaria	32	S2	19	Perangkat Desa	Paseban	Kencong
8	Rendy	23	SMK	12	Montir	Paseban	Kencong
9	Ibu Rendy	45	SD	4	Pedagang	Paseban	Kencong
10	Ibu Hamidah	47	SD	6	Pedagang	Paseban	Kencong
11	Rupidah	43	SD	6	Pedagang	Paseban	Kencong
12	Handoko	40	SD	6	Pedagang	Puger Wetan	Puger
13	Ramli	51	SD	6	Pedagang	Puger Wetan	Puger
14	Syafudin	51	SD	6	Pedagang	Puger Wetan	Puger
15	Tohar	44	SD	6	Petugas MCK	Puger Kulon	Puger
16	Yamin	47	SD	6	Petugas MCK	Puger Kulon	Puger
17	Fifi	39	SMP	9	Pedagang	Puger Kulon	Puger
18	Nur	40	SD	6	Pedagang	Puger Kulon	Puger
19	Hamdi	46	SD	5	Pengepul Ikan	Puger Kulon	Puger
20	Sopyani	44	SD	6	Petani	Curah Nongko	Tempurejo
21	Aan	47	SD	6	Petani	Curah Nongko	Tempurejo
22	Putri	41	SMP	9	Pedagang	Curah Nongko	Tempurejo
23	Salim	46	SD	4	Tambal Ban	Andongrejo	Tempurejo
24	Ibu Zul	42	SD	6	Pedagang	Andongrejo	Tempurejo

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

6.2 Peran BUMDes

6.2.1 BUMDes Paseban di Desa Paseban

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dapat dijelaskan peran BUMDes di berbagai wilayah pesisir di Kabupaten Jember. BUMDes Paseban Agung yang terletak di desa Paseban Kecamatan Kencong yang di ketuai oleh Bapak Suhartono ini beranggotakan 8 orang pengurus dengan 2 bidang yang dijalankan. Dua bidang tersebut adalah bidang wisata dan bidang wirausaha. Bidang wisata bertujuan untuk membangun pantai Paseban menjadi lebih bagus dan asri sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke pantai Paseban. Sejauh ini BUMDes Paseban Agung sudah menjalankan beberapa kegiatan di bidang wisata seperti memberi petunjuk arah, memberi pagar disekitar pantai dan masih banyak lagi yang dilakukan guna memperbaiki sarana dan prasarana pantai.

BUMDes Paseban Agung juga membangun kafe di dekat pantai sebagai salah satu wujud dari terlaksanya bidang wirausaha. Kafe tersebut juga sebagai tempat atau kantor BUMDes, Jadi untuk

kedepannya rapat anggota akan dilakukan di kafe tersebut. Tetapi kafe tersebut belum berjalan dengan semestinya karena hanya tersedia bangunannya saja, alat-alat yang diperlukan kafe masih belum ada. Seperti misalnya kompor, kursi, meja, lemari pendingin dan segala sarana yang diperlukan. Pendanaan untuk membangun kafe ini dari pemerintah pusat bukan dari ADD (Anggaran Dana Desa). Pendanaan dari pusat hanya cukup untuk mendirikan bangunan kafe saja jadi untuk mengisi sarana kafe pihak BUMDes masih mencari pendanaan lagi. Pendanaan bidang wisata itu sendiri murni dari ADD (Anggaran Dana Desa) tanpa ada bantuan dari pihak lain. BUMDes Paseban Agung juga berencana menambah satu bidang lagi yakni bidang peternakan guna untuk menambah pemasukan BUMDes kedepannya.

Sejauh ini Paseban Agung belum berkontribusi banyak bagi masyarakat Paseban itu sendiri karena belum berjalan dengan maksimal. Ada banyak kendala yang dihadapi salah satunya, masyarakat yang tinggal didekat pantai Paseban tidak mendukung penuh kegiatan yang dijalankan BUMDes. Masyarakat beranggapan bahwa

adanya BUMDes justru menghambat pemasukan masyarakat sekitar atau masyarakat menganggap BUMDes sebagai saingan berusaha mereka. Jadi pihak BUMDes sendiri belum bisa berinovasi untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. Desa Paseban juga masih banyak konflik yang berkaitan dengan isu SARA sehingga pihak BUMDes harus berhati-hati dalam kegiatan kedepannya.

6.2.2 BUMDes Mekarjaya di Desa Mojosari

BUMDes Mekarjaya yang terletak di Desa Mojosari diketuai oleh Bapak Abdul Wahid ini beranggotakan 3 orang anggota dengan satu bidang yang berjalan yakni bidang simpan pinjam. BUMDes ini belum memiliki unit kegiatan lain karena kendala dengan jumlah anggota dan kesibukan masing-masing anggota dan juga kendala dari sedikitnya dana yang menghambat BUMDes untuk mendirikan unit usaha lainnya.

Pendaan BUMDes dari DD (Dana Desa) atau ADD (Anggaran Dana Desa) sebanyak kurang lebih 100 juta yang secara keseluruhan dialokasikan untuk unit simpan pinjam yang dijalankan BUMDes. Syarat untuk mengajukan pinjaman ini sangat mudah yaitu mengisi formulir yang berisi biodata calon nasabah dan syarat-syarat yang harus dibaca dan dipahami, menandatangani kesepakatan yang sudah ditetapkan, fotokopi KTP dan KK, serta fotokopi slip gaji dan rekening listrik. Syarat tersebut adalah hasil dari kesepakatan anggota BUMDes dengan pemerintah desa. Jika dibandingkan dengan lembaga atau organisasi lain yang menjalankan program simpan pinjam, syarat dari BUMDes ini hanya terkesan formalitas saja yang dimana nantinya akan dijadikan laporan pertanggung jawaban dari BUMDes kepada pemerintah pusat.

Dikarenakan dana yang sedikit, maka para nasabah hanya bisa meminjam maksimal 10 juta dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Sasaran dari bidang simpan pinjam ini adalah ibu-ibu pengajian Desa Mojosari yang beranggotakan kurang lebih 30 orang. Pada awalnya ibu-ibu pengajian ini dikumpulkan di rumah Bapak Abdul Wahid untuk mensosialisasikan keberadaan Unit simpan

pinjam yang dijalankan oleh BUMDes ini. Sebanyak 20 orang yang menjadi nasabah dari unit simpan pinjam BUMDes ini. Setiap bulannya istri dari Bapak Abdul yang bertugas menagih uang cicilan dari ibu-ibu pengajian yang menjadi nasabah tersebut.

Dana yang diberikan sudah semuanya dianggarkan untuk bidang simpan pinjam. Keseluruhan nasabah adalah ibu-ibu yang dimana seperti kebanyakan lembaga simpan pinjam lainnya kendalanya pasti sama yakni nasabah yang susah dalam mengembalikan uang pinjaman dengan berbagai alasan serta tidak sedikit dari ibu-ibu ini yang marah jika ditagih uang setoran. Kendala ini membuat pihak BUMDes kesulitan memutar uang. Setiap bulannya Bapak Abdul Wahid dan anggota mengadakan rapat rutin guna membahas kelangsungan unit simpan pinjam ini.

BUMDes Mekarjaya akan berganti kepengurusan dalam waktu dekat karena anggota yang ada saat ini tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan utamanya dengan kegiatan BUMDes. Sehingga kegiatan BUMDes tidak akan maksimal jika para pengurusnya saja tidak punya waktu luang untuk berbagai kegiatan BUMDes.

6.2.3 BUMDes Mulyorejo di Gumukmas

BUMDes selanjutnya adalah Mulyorejo di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas yang beranggotakan 3 orang dengan Bapak Ponidi sebagai ketuanya. Bapak Ponidi dan anggota merupakan bentuk kepengurusan baru dari BUMDes Mulyorejo. Sebelum Bapak Ponidi dan anggota menjabat, terdapat kepengurusan lama yang berjalan selama 2 tahun yang kemudian berganti kepengurusan baru. Pihak BUMDes tidak menjelaskan secara jelas mengapa kepengurusan lama diganti. Belum ada satupun unit kegiatan yang dijalankan oleh kepengurusan lama.

Salah satu alasan yang dijelaskan mengapa kepengurusan lama tidak berjalan adalah karena belum adanya SK (Surat Keputusan) dari pihak desa. SK (Surat Keputusan) sendiri sebagai salah satu syarat pencairan dana, maka apabila SK (Surat Keputusan) belum ada, danapun tidak bisa cair. Pihak desa pun terkesan lambat dalam membentuk SK (Surat Keputusan) padahal kepengurusan yang lama sudah kurang lebih

dua tahun dibentuk. Begitupula kepengurusan saat ini, SK (Surat Keputusan) dari desa pun belum dibuat, sehingga BUMDes belum menjalankan berbagai unit yang sudah direncanakan dan juga BUMDes berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa bidang yang menjadi wacana Bapak Ponidi dan anggota adalah bidang peternakan dan bidang pariwisata. Hampir sama seperti beberapa desa lainnya, Desa Kepanjen juga memiliki pantai sebagai tempat wisata yang nantinya BUMDes akan memperbaiki sarana dan prasana pantai agar lebih rindang dan asri. BUMDes nantinya juga akan membeli beberapa ekor sapi yang akan dikembangkan sendiri sebagai wujud dari bidang peternakan. Kontribusi BUMDes dalam bidang peternakan adalah berupa pemberian SPT (Suplement Pakan Ternak) untuk masyarakat sekitar. Maka sebelum itu BUMDes harus memastikan SPT yang akan diberikan sudah teruji keamanannya untuk itu mereka menguji coba SPT tersebut untuk sapi BUMDes terlebih dahulu. Adanya rencana ini karena melihat banyaknya peluang dari masyarakat yang beternak sapi di daerah Kepanjen itu sendiri.

Sejauh ini Bapak ponidi dan anggota belum menemukan kendala yang berat dalam menjalankan BUMDes ini. Bapak Ponidi dan anggota juga kompak dalam membangun BUMDes serta dapat membagi waktu antara pekerjaan utama dan perannya sebagai BUMDes mengingat pekerjaan anggota BUMDes yang semuanya adalah guru di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Desa Kepanjen.

6.2.4 BUMDes Sejahtera di Puger Kulon

Desa Puger Kulon memiliki BUMDes yang bernama Sejahtera yang beranggotan 6 orang yang diketuai oleh Bapak Mashudi. Terdapat 4 bidang di dalamnya antara lain bidang pariwisata, bidang perikanan, bidang kesehatan, dan bidang kewirausahaan. Dari banyaknya bidang tersebut yang berjalan adalah bidang kesehatan. Bidang lain tidak berjalan karena terkendala dari jumlah anggota yang sedikit dan kuruan dana dari pihak desa juga sedikit. Bapak Mashudi bermaksud untuk menjalankan satu persatu bidang agar maksimal.

Berjalannya bidang kesehatan dengan wujud pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di wisata pantai puger. Berjalannya bidang kesehatan ini juga dibantu masyarakat sekitar. Adanya MCK (Mandi Cuci Kakus) di Pantai Puger yang membantu memudahkan masyarakat atau pengunjung apabila membutuhkan kamar mandi atau wc dan juga sebagai salah satu pemasukan BUMDes. BUMDes bekerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan MCK (Mandi Cuci Kakus) ini yang nantinya penghasilnya juga dibagi dua dengan petugas yang menjaga dengan perbandingan 80% untuk BUMDes dan 20% untuk petugas yang menjaga.

Bidang perikanan sempat berjalan yakni berupa budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele dipasarkan langsung di pasar daerah puger yang hasilnya dijadikan modal untuk menjalankan bidang-bidang lainnya. Tetapi budidaya ikan lele ini tidak berjalan dengan lancar karena di periode ketiga masa budidaya, ikan-ikan lele terkena penyakit yang menyebabkan semua ikan mati dan pihak BUMDes mengalami kerugian yang banyak. Sejak saat itu budidaya ikan lele tidak beralan lagi karena belum adanya modal untuk memulai usaha kembali.

Bidang wirausaha yang menjadi wacana adalah pembangunan toko alat tulis dan sembako. Dikarenakan modal yang dikeluarkan akan sangat banyak apabila harus membangun toko, maka Bapak Mashudi memberi usul untuk menjadikan toko di depan rumahnya yang sudah lama tidak dipakai untuk dipakai sementara dalam bidang wirausaha. Tetapi karena hampir semua modal dialihkan untuk budidaya lele maka bidang wirausaha tidak berjalan mengingat juga budidaya ikan lele yang mengalami kerugian yang cukup besar.

Sejauh ini BUMDes belum banyak berkontribusi dalam membantu kesejahteraan masyarakat setempat karena para anggotanya yang juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga kegiatan BUMDes tidak maksimal dan juga terhalang dengan kurangnya dana yang di cairkan oleh pihak desa serta kendala disetiap bidang yang belum terselesaikan. Masyarakat pun masih banyak yang belum mengerti keadaan BUMDes itu sendiri.

6.2.5 BUMDes Sejahtera di Desa Ambulu

Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu juga memiliki BUMDes yang bernama Sejahtera, sama dengan nama BUMDes di puger kulon. Diketahui oleh Bapak Muslimin Junaedi dengan beranggotakan 3 orang. BUMDes Sejahtera memiliki 2 unit yakni bidang wirausaha dan bidang ternak. Bidang ternak berupa budidaya ikan lele dan bidang wirausaha berupa usaha mebel.

Pada awalnya pengurus BUMDes belajar cara budidaya lele kepada peternak sekitar. Setelah dari situ para Pengurus menjalankan budidaya ikan lele sendiri. Bapak Muslimin dan anggota memilih budidaya ikan lele karena dianggap budidaya ikan lele yang paling mudah dilakukan. Budidaya lele ini dilakukan di rumah bendahara BUMDes. Ukuran kolam 4x4 meter dengan kapasitas kolam dapat menampung kurang lebih 1000 ekor lele. Hanya ada satu kolam saja karena pengurus BUMDes sangat hati-hati dalam menjalankan budidaya ikan lele ini. Peternak lele di daerah sekitar yang nantinya akan mengambil ikan lele yang sudah siap panen. Jadi bisa dikatakan BUMDes bermitra dengan peternak lele dalam hal pemasaran ikan lele itu sendiri. Keuntungan dari penjualan ikan lele disimpan untuk membuat kolam tambahan dan juga untuk unit BUMDes lainnya.

Bapak Muslimin adalah seorang kontraktor yang dimana usaha mebel dijalankan oleh warga sekitar yang merupakan rekan kerja dari bapak Muslimin. Usaha mebel ini berupa pembuatan kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan usaha mebel, budidaya ikan lele yang paling berjalan. Usaha mebel ini diurus langsung oleh Bapak Muslimin, tetapi karena kesibukan beliau sendiri usaha mebel ini jadi terbengkalai. Pengurus lainnya juga terkesan lepas tangan dalam usaha mebel ini.

Mendengar dari penjelasan Bapak Muslimin kendala BUMDes ini adalah kesulitan pengurus untuk membagi waktu terutama saat BUMDes akan mengadakan rapat rutin. Adanya rapat rutin berguna untuk membahas progress dari usaha yang dijalankan dan juga membahas kendala apa saja yang dihadapi. Tetapi sampai saat ini

rapat rutin jarang diadakan karena berbagai macam alasan pengurus saat akan diadakan rapat.

6.2.6 BUMDes Sido Mekar di Desa Mojomulyo

Desa Mojomulyo Kecamatan Puger merupakan BUMDes yang belum punya kegiatan sama sekali mulai dari awal dibentuk sampai saat ini. BUMDes sudah berjalan 3 tahun mulai awal dibentuk pada tahun 2017. Kendala BUMDes Sido Mekar ini adalah belum ada dana sama sekali dari desa sehingga belum ada kegiatan yang dijalankan. Serta pihak desa belum mengurus SK (Surat Keterangan) dari BUMDes ini. Bidang yang menjadi wacana adalah bidang wirausaha berupa jual beli alat tulis dan fotocopy. Wacana ini sudah ada semenjak awal dibentuk BUMDes. Dana dari desa baru turun pertengahan tahun 2019 yang dimana dana tersebut hanya cukup untuk membeli gedung kecil untuk fotocopy.

Para pengurus BUMDes juga sebenarnya enggan untuk menjalankan BUMDes ini karena para pengurus tidak mendapatkan apa-apa. Menurut Bapak Adi Purnomo selaku ketua, pihak desa tidak jelas dalam memberikan instruksi. Banyak wacana dari pihak desa untuk unit kegiatan BUMDes tetapi dana yang dikeluarkan hanya sedikit. Sampai saat ini Gedung tempat fotocopy tidak diisi apa-apa karena tidak ada dana untuk membeli alat tulis yang akan diperjual belikan.

6.2.7 BUMDes Mitra Usaha di Desa Andong Rejo

Desa Andong Rejo Kecamatan Tempurejo berlokasi tidak jauh dari pantai Bandialit. Wisata pantai Bandialit merupakan salah satu wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Jember. BUMDes di desa Andongrejo yang diketuai oleh Bapak Sumardi ini berfokus kegiatan pada perbaikan sarana dan prasana pantai Bandialit saja. Pengurus BUMDes dibantu oleh para pemuda-pemuda sekitar dalam memperbaiki sarana dan prasana pantai bandialit.

Pantai Bandialit berdekatan dengan Taman Nasional Meru Betiri. Para pemuda yang membantu BUMDes beranggapan bahwa Meru Betiri menjadi ancaman untuk Pantai Bandialit karena para wisatawan

lebih memilih berkunjung ke Meru Betiri dari pada Pantai Bandialit. Dari sini terjadi selisih paham antara pengurus Meru Betiri dengan Pantai Bandialit

Sejauh ini yang sudah dilakukan dalam memperbaiki sarana prasarana adalah membuat petunjuk arah, membuat tempat duduk dari kayu, dan lain sebagainya guna untuk mempermudah pengunjung menuju Pantai Bandialit. Kegiatan ini berjalan di tahun pertama saja. Untuk saat ini tidak ada kegiatan yang dijalani oleh BUMDes karena dana dari desa sudah habis dialokasikan untuk memperbaiki sarana prasarana Pantai Bandialit.

6.2.8 BUMDes Sido Makmur di Desa Curah Nongko

Berdekatan dengan Andongrejo, Desa Curah Nongko juga memiliki BUMDes yang diketuai oleh Bapak Kriss. Berbeda dengan Andong Rejo, desa Curah Nongko berfokus pada pembuatan souvenir dari bahan kayu karena banyak masyarakat sekitar yang terampil. BUMDes Sido Makmur ini hanya menjalankan satu kegiatan usaha aja. Warga dikumpulkan di rumah Bapak kriss dan diberitahukan bahwa BUMDes akan mengadakan kegiatan pembuatan souvenir. Tujuan Pak Kris adalah ingin membentuk desa Curah Nongko ini sebagai desa penghasil kerajinan seperti di Balung dan di beberapa daerah lainnya di jember.

Pemasaran produk-produk tersebut juga sudah sampai ke luar Jember yaitu di wilayah Bali dan sekitarnya. Kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pendapatan warga. Tetapi disayangkan BUMDes dengan pihak perangkat desa tidak sejalan. Pihak desa tidak terlalu mendukung rencana pengurus BUMDes ini karena perangkat desa memiliki agenda kegiatan lain yang dianggapnya lebih layak. Pihak desa tidak menjelaskan kegiatan apa yang akan dijalankan. Pengurus BUMDes tidak sejalan perangkat desa atau selalu berbeda pendapat dalam berbagai hal. Sehingga kegiatan ini hanya berlangsung satu bulan saja karena Bapak Kriss tidak mau melanjutkan apabila tidak ada dukungan dari pihak desa. Mulai dari saat itu BUMDes desa Curah Nongko tidak aktif lagi atau vakum.

6.2.9 BUMDes Pesona Harapan di Desa Puger Wetan

Pesona harapan merupakan nama dari BUMDes Puger Wetan Kecamatan Puger yang diketuai oleh Bapak Raharjo. Saat ini BUMDes Pesona Harapan sudah mengalami estafet kepemimpinan. Pengurus lama sudah lengser dan digantikan oleh pengurus-pengurus baru. Sebenarnya yang berganti hanya ketuanya saja, untuk bendahara dan sekertaris tetap. Pihak desa menjelaskan bahwa ketua dari periode sebelumnya mengundurkan diri tanpa ada alasan yang jelas. Pihak desa langsung menggati ketua tersebut agar tidak menghambat kinerja BUMDes kedepannya.

Rapat BUMDes rutin dilakukan setiap satu bulan sekali secara bergantian di rumah pengurus BUMDes atau di Kantor Desa. Mereka hanya memiliki dua bidang kegiatan yakni bidang wirausaha dan bidang ternak. Bidang wirausaha bergerak pada jual beli gas LPG yang bertepatan di rumah Bapak Raharjo. Bapak Raharjo memiliki toko yang menjual sembako maka dari itu penjualan gas LPG bisa sekaligus dijual di toko milik Bapak Raharjo. Bidang ternak bergerak pada budidaya bebek yang dimana kandang bebek tersebut terdapat didekat rumah Bapak Raharjo. Budidaya bebek tidak berlangsung lama karena mengalami kerugian yang besar.

Modal yang digunakan yakni 50% untuk ternak bebek dan 50% untuk penuaian gas LPG. Dijelaskan bahwa budidaya bebek membutuhkan modal yang banyak jadi sebagian dari keuntungan menjual gas LPG digunakan untuk menambah modal budidaya bebek. Secara perlahan BUMDes mengalami kebangkrutan karena buruknya pengelolaan dana yang ada. Karena itu BUMDes menutup semua usahanya karena sudah tidak ada lagi dana dari desa yang bisa dikelola.

Dari hasil penelitian ini didapat beberapa peran BUMDes bagi masing-masing desa. Peran tersebut didapat dari penelusuran peneliti di tempat penelitian yang dilakukan. Peran tersebut disajikan dalam Tabel 6.4 sebagai berikut.

Tabel 6.4 Peran Bumdes Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember

Nomor	Peran	Jumlah (BUMDes)	%
1	Meningkatkan wisata pantai setempat	5	56
2	Berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	8	89
3	Berperan dalam meningkatkan sektor peternakan	2	22
4	Mengembangkan usaha masyarakat sekitar	4	44
5	Mengembangkan potensi desa	8	89

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

6.3 Peran BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Ekonomi

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji analisis yang sudah ditentukan pada suatu penelitian. Pada Tabel 6.5 berikut merupakan hasil uji normalitas pada data pendapatan masyarakat pesisir sebelum dan setelah adanya BUMDes.

6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai

Tabel 6.5 Hasil uji normalitas data pendapatan sebelum dan sesudah ada BUMDes

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
SEBELUM	.301	23	.000	.551	23	.000
SESUDAH	.354	23	.000	.579	23	.000

Sumber: Analisis data primer (2020)

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena menggunakan sampel dibawah 30. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Exact sig. 2 (2-tailed) dari sebelum dan setelah adanya BUMDes sama-sama menunjukkan angka dibawah ketetapan yakni 0,05 yang berarti bahwa keduanya menunjukkan bahwa distribusi sebaran data adalah tidak normal. Setelah mengetahui bahwa sebaran data tidak normal, maka dilanjutkan dengan menggunakan uji analisis Wilcoxon.

(Pratama, 2012). Uji Wilcoxon digunakan apabila diketahui bahwa sebaran data tidak normal. Dalam penelitian ini hasil Uji Wilcoxon ditampilkan pada Tabel 6.6.

6.3.2. Uji Wilcoxon

Uji Wilcoxon untuk menjawab tujuan kedua yaitu mengetahui seberapa besar peran BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember Uji Wilcoxon merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda

Tabel 6.6 Hasil uji wilcoxon pada data pendapatan masyarakat pesisir sebelum dan setelah ada BUMDes.

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
SESUDAH – SEBELUM	Negative Ranks	0 ^a	0,00	0,00
	Positive Ranks	6 ^b	3,50	21,00
	Ties	18 ^c		
	Total	24		

Sumber : Hasil analisis data primer (2020).

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, nilai-nilai yang didapat adalah nilai *mean rank*, dan *sum of rank* dari kelompok *negative ranks* dan *positive ranks*. *Negative Ranks* atau selisih antara pendapatan masyarakat sebelum dan setelah ada BUMDes yang memiliki selisih nilai negatif adalah 0 dengan rata-rata ranking 0,00. *Positive ranks* atau selisih antara pendapatan masyarakat sebelum dan setelah ada BUMDes yang memiliki selisih nilai positif yaitu sebanyak 6 dengan rata-rata 21,00.

Tabel 6.7 Tingkat Signifikansi selisih pendapatan masyarakat sebelum dan setelah ada BUMDes.

	SESUDAH - SEBELUM
Z	-2.207 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,027

Dari tabel diatas menunjukkan nilai asymp. Sig = 0,027. Oleh karena nilai asymp. Sig < $\alpha=0,05$ maka H0 ditolak yang berarti bahwa BUMDes tidak berperan positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember.

6.4 Strategi Pengembangan BUMDes

Menurut Siagian (2000), strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dan untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang. Strategi memiliki beberapa sifat, yaitu menyatu (*unified*), menyeluruh (*comprehensive*), dan integral (*integrated*).

Dilihat dari hasil *ranks* yang menunjukkan $T(+) \geq T(-)$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan menunjukkan bahwa BUMDes tidak memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Setelah melihat nilai *ranks* pada selisih pendapatan masyarakat setelah dan sebelum ada BUMDes, dilanjutkan dengan mengukur tingkat signifikansi. Pada Tabel 6.7 ditampilkan tingkat signifikan pada taraf uji $\alpha = 0,05$.

Strategi banyak jenisnya, salah satunya adalah strategi bisnis yang biasa dilakukan dengan Perluasan geografis, diversifikasi, pengembangan produk, dan penetrasi pasar.

Strategi yang baik bagi perusahaan harus diperoleh melalui penyusunan strategi, meliputi studi pada rangkaian kegiatan manajerial yang berinteraksi dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan berpengaruh pada pencapaian sasaran perusahaan. Strategi mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, sehingga strategi berorientasi ke masa depan. Strategi dalam perumusannya mempertimbangkan faktor-faktor internal

maupun eksternal yang dihadapi perusahaan (David, 2009).

Berdasarkan hasil analisis faktor internal berupa kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta analisis faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), maka selanjutnya akan diidentifikasi untuk menentukan faktor-faktor kunci kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyusun matriks EFE (*Eksternal Factor Evaluation*) dan matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*).

6.4.1 Kekuatan

a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Dukungan pemerintah menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki BUMDes. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Dapat dilihat dari komitmen pemerintah kabupaten dalam mengembangkan BUMDes. Pemerintah kabupaten memberikan sosialisasi serta pelatihan gratis untuk setiap anggota BUMDes di seluruh wilayah Jember yang bertepatan di Pendopo Jember. Pelatihan ini berguna untuk lebih memperkenalkan BUMDes lebih dalam kepada pengurus BUMDes agar nantinya pengurus lebih paham tujuan pembentukan BUMDes. Pelatihan ini juga berguna untuk membuka wawasan para pengurus BUMDes tentang peluang usaha atau bisnis yang nantinya dapat diterapkan pada usaha BUMDes yang sudah direncanakan.

Pemerintah kabupaten juga memberi dana untuk BUMDes yang dinilai memiliki potensi yang bagus untuk perkembangan desa. Dari sembilan BUMDes di wilayah pesisir, BUMDes Paseban Agung adalah satu-satunya yang mendapat bantuan dana dari pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten menilai bahwa keseriusan anggota BUMDes dan perangkat desa dapat menjadi peluang untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di Desa Paseban Agung.

b. Permodalan dana desa

Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Desa (APD). Dijelaskan secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 pasal

135. Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya BUMDes mendapat dana yang banyak dari pemerintah desa yang nantinya dana tersebut berguna untuk menjalankan program yang direncanakan oleh pengurus BUMDes.

6.4.2 Kelemahan

a. Kurangnya Jumlah Anggota Pengurus BUMDes

Pemerintah desa memilih pengurus BUMDes dengan sesuka hati tanpa melihat potensi yang ada pada individu yang dipilih. Perekrutan anggota harusnya dilakukan dengan sebaik mungkin untuk memilih siapa saja yang pantas untuk menjadi pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes haruslah orang-orang yang kompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi karena nantinya pengurus ini yang akan menjalankan BUMDes dan membawa pengaruh besar bagi masyarakat desa.

Tetapi pemerintah desa terkesan asal-asalan dalam memilih pengurus BUMDes. Kendala lain adalah sedikit dari masyarakat yang mau terlibat dalam kepengurusan BUMDes ini dengan alasan yang bermacam-macam. Salah satu alasannya adalah masyarakat lebih memilih focus untuk mengerjakan pekerjaan utamanya dari pada menjadi pengurus BUMDes. Sehingga pembentukan kepengurusan yang ada menjadi tidak maksimal karena keterbatasan SDM yang dimiliki masing-masing desa.

b. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelembagaan yang Belum Optimal Mendukung

Pembentukan BUMDes di masing-masing desa dapat dikatakan hanya sebagai bentuk pemerintah desa telah melaksanakan tugas saja. Pemerintah desa terkesan tidak sungguh-sungguh dalam membangun BUMDes. Dapat dilihat dari kinerja pemerintah desa yang lamban dalam melayani BUMDes. Ada beberapa dari BUMDes di daerah pesisir yang belum memiliki SK (Surat Keputusan) padahal SK (Surat Keputusan) merupakan hal yang wajib dimiliki oleh BUMDes. Banyak dari pemerintah desa yang memberikan sosialisasi tentang bagaimana kegiatan-kegiatan BUMDes kedepan tetapi setelah itu pemerintah desa terkesan lepas tangan dan abai terhadap segala kegiatan BUMDes.

Seperti yang dapat diketahui BUMDes berada di bawah naungan desa yang dimana segala kegiatan BUMDes harus diketahui oleh pemerintah desa untuk mendukung kelancaran kegiatan. Tetapi pemerintah desa lamban dalam merespon kegiatan tersebut. Padahal tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Jika sikap pemerintah seperti ini, maka tujuan dibentuknya BUMDes tidak akan tercapai. Pembentukan BUMDes dapat dikatakan hanya sebagai pura tugas bagi pemerintah desa

c. **Terbatasnya Inovasi dan Kreatifitas dari Pengelola BUMDes**

Terbatasnya anggota juga menjadi penghambat para anggota BUMDes untuk membentuk inovasi baru karena ide-ide baru hanya muncul dari beberapa orang saja. Sehingga unit-unit kegiatan hanya itu-itu saja. Padahal dengan kucuran dana dari desa yang cukup besar berguna untuk BUMDes menjalankan banyak unit kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi pada kenyataannya dana yang ada terbuang sia-sia karena BUMDes hanya berkuat pada kegiatan yang tidak memberi prospek yang positif untuk pemasukan BUMDes kedepannya.

d. **Program Kerja BUMDes yang Masih Terbatas**

Rencana yang disusun dengan matang pada nyatanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Setiap anggota BUMDes memiliki kesibukan masing-masing di luar BUMDes itu sendiri. Kebanyakan dari pengurus BUMDes yang lebih focus menjalankan pekerjaan utamanya dan tidak bisa membagi waktu untuk kegiatan BUMDes. Kesibukan tersebut membuat para anggota kesulitan untuk mengadakan rapat rutin yang berguna untuk menyusun kegiatan-kegiatan BUMDes. Sehingga penyelenggaraan kesiatan BUMDes menjadi terbengkalai.

e. **Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki BUMDes**

BUMDes tidak memiliki gedung untuk dijadikan kantor atau tempat berkumpulnya para pengurus. Padahal kebutuhan kantor ini menjadi penunjang

dalam pelaksanaan BUMDes agar saat melakukan rapat rutin para pengurus tidak kebingungan mencari lokasi untuk berkumpul. Selama ini BUMDes mengadakan rapat rutin di tempat-tempat tertentu seperti, kantor desa, rumah ketua BUMDes, dan rumah pengurus BUMDes lainnya. Ketika sarana dan prasarana tidak memadai berakibat dalam keterbatasan kegiatan yang akan dijalani BUMDes. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan BUMDes untuk menunjang keberlangsungan kegiatan BUMDes kedepannya.

6.4.3 Peluang

a. **Sumber Daya Alam yang mendukung untuk terus Dikembangkan**

Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing yang dapat dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Dari sini dapat dilihat bagaimana para pengurus memanfaatkan peluang yang ada untuk keberlangsungan kegiatan BUMDes. Sektor wisata tersebut dapat dimanfaatkan BUMDes untuk mencari keuntungan. Begitupula dengan potensi lain yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Sebagai contoh yakni BUMDes di Desa Curah Nongko yang memanfaatkan keterampilan masyarakat sekitar untuk membuat kerajinan dari kayu. Dari sini BUMDes sudah dapat memanfaatkan peluang yang ada dan dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa BUMDes menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan masih banyak lagi potensi-potensi desa yang dapat dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan bagi BUMDes hanya tergantung pada kepekaan pengurus dalam membaca peluang yang ada.

b. **Dukungan Mitra**

Beberapa dari BUMDes sudah memiliki mitra kerja yang membantu melancarkan unit usaha yang ada. Seperti contoh BUMDes di Desa Curah Nongko yang bermitra dengan salah satu toko kerajinan di Bali yang sangat mendukung kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes

tersebut. Tanpa adanya mitra atau rekan bisnis ini keberlangsungan unit usaha BUMDes tidak akan berjalan dengan lancar. Serta pemerintah pusat juga memberi dukungan bagi BUMDes dengan menyalurkan bantuan dana. Adanya dukungan dari pihak luar desa turut membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang terselenggara. Walaupun bantuan yang diberikan tidak banyak tetapi sudah cukup membantu untuk menambah kekurangan yang ada.

6.4.4 Ancaman

a. Kurangnya Dukungan Masyarakat Sekitar

Tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah untuk membantu pemasukan desa. Sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa adanya BUMDes menjadi ancaman terhadap kegiatan usaha mereka. Sehingga banyak dari masyarakat yang terkesan acuh apabila BUMDes meminta bantuan. Beberapa dari kelompok masyarakat juga tidak mendukung unit kegiatan yang dijalankan BUMDes karena masyarakat mengira BUMDes menjadi saingan dalam usaha yang dijalankan masyarakat.

b. Adanya pesaing atau kompetitor

Setiap bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau lembaga pastilah ada pesaing di sekitarnya. Setiap usaha yang dimiliki BUMDes pada masing-masing desa juga memiliki pesaing. Persaingan yang ketat membuat BUMDes kalah dengan pesaing-pesaingnya juga dikarenakan skala usaha yang dijalani oleh BUMDes masih masuk usaha kecil. Misalnya di wilayah pesisir pantai yang dimana nelayan selalu menjual hasil tangkapannya kepada pengambek. Pengambek merupakan seseorang yang meminjamkan modal kepada nelayan untuk pergi melaut. Modal yang dipinjam nelayan dari pengambek dibayar dengan ikan hasil tangkapan. Sietem pengambek sama dengan rentenir. Jadi pengambek dianggap sebagai kompetitor bagi unit usaha BUMDes terutama simpan pinjam.

c. Konflik Kepala Desa

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Konflik yang bersifat elitis

menandai konflik yang secara umum sering terjadi di desa-desa. Dilihat dari tinjauan lapang di Desa Curah Nongko merupakan desa yang pengurus BUMDesnya tidak sejalan dengan perangkat desa. Pengurus BUMDes memiliki rencana kegiatan yang berorientasi untuk kebaikan masyarakat desa, tetapi hal ini tidak disetujui oleh para perangkat desa.

Perangkat desa memiliki alur kegiatan sendiri yang menurut mereka bagus untuk dijalankan di wilayah Curah Nongko. Tetapi ini hanya menjadi akal-akalan pemerintah desa saja untuk mencairkan dana BUMDes lebih banyak. Pemerintah desa juga pernah mengajukan proposal kepada salah satu perbankan untuk peminjaman modal usaha BUMDes dengan nominal yang cukup besar. Kejujuran pengurus BUMDes di Desa Curah Nongko membuat kepala desa dan perangkatnya untuk enggan lagi mendukung alur kegiatan BUMDes.

Kebanyakan konflik di tiap-tiap desa juga sama yakni kejujuran perangkat desa dalam pengadaan dana BUMDes. Tidak jarang juga kepala desa ikut campur atas keuntungan yang dihasilkan oleh unit kegiatan BUMDes. Maka dari itu konflik elit politik desa merupakan ancaman yang besar bagi BUMDes. Bahkan tidak hanya BUMDes, tiap kegiatan yang ada di desa pasti selalu ada kecurangan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

6.4.5 Analisa Matriks IFE

Analisa internal perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor kunci kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Untuk lebih lanjut faktor-faktor strategis internal tersebut dimasukkan kedalam matriks IFE untuk mendapatkan total nilai yang dibobot. Dimana nilai total yang dibobot merupakan hasil penjumlahan total dari perkalian bobot dengan rating masing-masing factor strategis internal.

Demikian pula dengan pemberian rating (peringkat), penentuan peringkat dilakukan dari hasil wawancara dengan masyarakat pesisir tersebut yang hasilnya merupakan rata-rata, sehingga didapatkan nilai terboboti dari faktor-faktor tersebut.

Tabel 6.8 Matriks *Internal Factor Evaluation (IFE)* Pengurus BUMDes.

	Faktor-Faktor Internal	Rata-Rata		BOBOT X RATING
		Bobot	Rating	
	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)			
A	Dukungan Pemerintah Kabupaten	0,48	4	1,92
B	Permodalan Program Dana Desa	0,52	3	1,56
	Total Skor Terboboti	1,00	7	3,48
	KELEMAHAN (<i>weakness</i>)			
C	Kurangnya Jumlah Anggota Pengurus BUMDes	0,21	6	1,26
D	Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal mendukung	0,18	3	0,54
E	Terbatasnya inovasi dan kreatifitas dari pengelola BUMDes	0,22	6	1,32
F	Proram Kerja BUMDes yang masih terbatas	0,21	6	1,26
G	Terbatasnya sarana, prasarana yang dimiliki oleh kelembagaan BUMDes	0,19	7	1,33
	Total Skor Terboboti	1,01	28	5,71
	Total rata-rata S-W			-2,23

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

Dari Tabel 6.8 hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor strategis internal, kemudian memberikan bobot dan rating kepada setiap faktor maka diperoleh hasil seperti pada tabel di atas. Berdasarkan hasil analisis pada matriks IFE secara umum, dari total nilai yang dibobot (-2,23) menunjukkan bahwa BUMDes memiliki faktor internal yang tergolong rendah, kemampuan BUMDes memanfaatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan adalah rendah.

6.4.6 Analisa Matriks EFE

Langkah-langkah untuk menyusun matriks EFE hampir sama dengan langkah pada penyusunan matriks IFE, hanya berbeda pada faktor strategis yang dimasukkan pada matriks EFE merupakan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh BUMDes di daerah pesisir Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara mendalam

yang penulis lakukan dengan para anggota BUMDes maka didapatkan total nilai yang dibobot. Dimana total nilai yang dibobot merupakan hasil penjumlahan total dari perkalian bobot dengan rating masing-masing factor strategis eksternal. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode *Paired Comparison* sehingga diperoleh bobot masing-masing faktor. Demikian pula dengan pemberian rating (peringkat) yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, sehingga didapatkan nilai terboboti dari faktor-faktor tersebut.

Hasil identifikasi peluang dan ancaman sebagai faktor strategis eksternal, kemudian memberikan bobot dan rating kepada setiap faktor maka diperoleh hasil seperti Tabel 6.9. Hasil analisa matriks EFE dengan skor (-0,45) hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan eksternal BUMDes belum merespon dengan baik peluang dan ancaman.

Tabel 6.9 Matriks *Eksternal Factor Evaluation* (EFE)

	Faktor-Faktor Eksternal	Rata-Rata		BOBOT X RATING
		Bobot	Rating	
	PELUANG (<i>Opportunities</i>)			
A	Sumber Daya Alam yang Mendukung untuk Terus Dikembangkan	0,51	6	3,06
B	Dukungan pihak Mitra	0,49	5	2,45
	Total Skor Terboboti	1,00	11	5,51
	Ancaman (<i>Threats</i>)			
C	Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar	0,29	7	2,03
D	Konflik kepala desa	0,33	5	1,65
E	Adanya pesaing atau kompetitor	0,38	6	2,28
	Total Skor Terboboti	1,00	18	5,96
	Total rata-rata O-S			-0,45

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

6.4.7 Matriks I-E

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, total nilai yang dibobot pada matriks IFE adalah (-2,23) artinya BUMDes memiliki faktor internal yang berada di titik rendah sedangkan total nilai yang dibobot pada matriks EFE untuk responden pengurus BUMDes dan perangkat desa adalah (-0,45) yang artinya respon perusahaan terhadap faktor-faktor eksternal yang dihadapinya tergolong rendah pula.

Tabel 6.10 Pedoman Posisi Kuadran

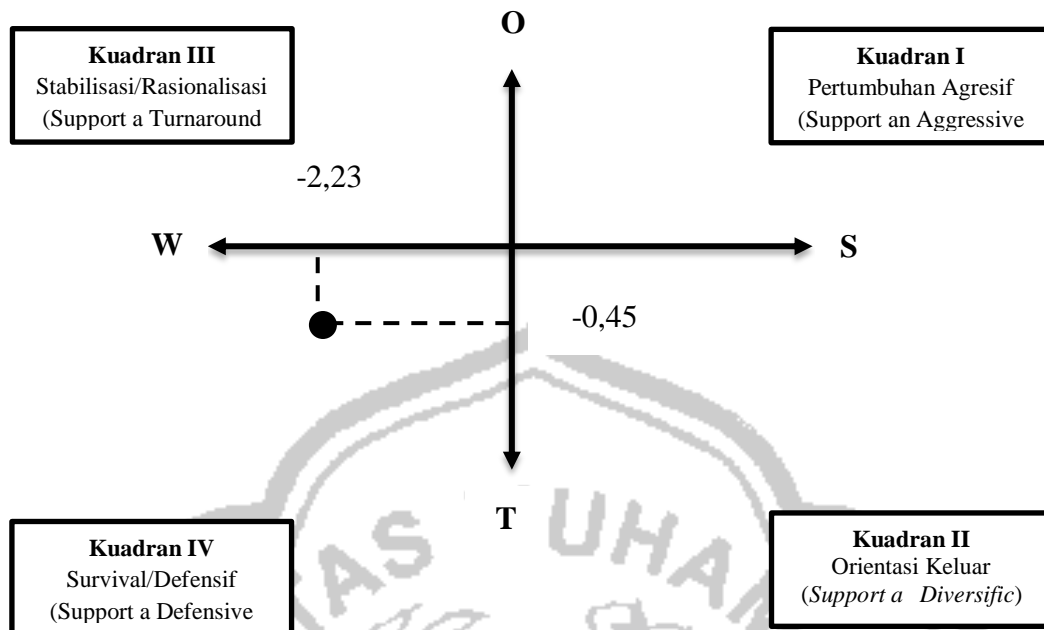
No.	Posisi	Kondisi	Nilai
1	Posisi I (Pertumbuhan/Agresif)	Internal	Positif
		Eksternal	Positif
2	Posisi II (Deversifikasi)	Internal	Positif
		Eksternal	Negatif
3	Posisi III (turn around/berputar)	Internal	Positif
		Eksternal	Negatif
4	Posisi IV (Defensif)	Internal	Negatif
		Eksternal	Negatif

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

Berdasarkan pedoman tersebut, saat ini BUMDes berada pada posisi/kuadran IV (*Defensif*). Ini menunjukkan bahwa BUMDes berada pada posisi tidak menguntungkan. Posisi ini menandakan

Total nilai yang dibobot pada matriks IFE dan EFE tersebut kemudian ditetapkan pada matriks I-E, sehingga dapat diketahui posisi usaha saat ini, kemudian baru dirumuskan alternatif strategi yang sesuai dengan posisi usaha di matriks I-E. Posisi BUMDes ditentukan berdasarkan hasil perhitungan selisih nilai kekuatan dan nilai kelemahan, dan selisih nilai peluang dan nilai ancaman, dengan berpedoman sebagai berikut:

bahwa BUMDes menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Berikut ini posisi SWOT BUMDes dan gabungan dengan perangkat desa.



Gambar 6.1 Posisi Kuadran BUMDes dan Perangkat Desa

6.4.8 Strategi dan Pengembangan

Berdasarkan matriks IE posisi analisis SWOT BUMDes dapat disusun empat strategi utama yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O), meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W-O), menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (S-T) dan meminimalkan

kelemahan untuk mengatasi ancaman (W-T). Dalam Strategi dan pengembangan BUMDes, faktor-faktor internal dan eksternal tersebut ditabulasikan pada matriks analisa SWOT. Matriks analisa SWOT dalam merumuskan strategi pengembangan BUMDes tersebut dapat dilihat pada tabel 6.7. Adapun strategi-strateginya adalah:

S – O
1.Memanfaatkan Potensi yang Luas dan Dinamis 2.Memaksimalkan Perkembangan Sektor Parawisata Daerah 3.Mengoptimalkan Budaya Penduduk Setempat atau Solderitas Sosial 4.Meningkatkan Dukungan lain
W-O
1.Meningkatkan Kuantitas terhadap sumberdaya manusia pelaksana dari BUMDes 2.Memaksimalkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
S-T
1.Menjalin Kerja Sama Antar Mitra Sebagai Sarana Penunjang Kemajuan Usaha 2. Memperluas Jejaring Usaha
W-T
1.Mengoptimalkan Administrasi Guna Mengetahui Sistem Keuangan Yang Jelas 2.Menjalin hubungan yang membawa dampak positif dengan perangkat desa.

Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah pesisir Kabupaten Jember belum maksimal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Keberadaan BUMDes di wilayah pesisir Kabupaten Jember tidak terlalu berarti dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dilihat dari hasil uji T bahwa $P > 0,05$ yakni 0,304 yang artinya bahwa adanya BUMDes di desa-desa tersebut tidak terlalu membawa dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di kabupaten jember
3. Berdasarkan hasil Analisis SWOT, BUMDes wilayah pesisir di Kabupaten Jember berada pada posisi/kuadran IV (*Devensiff*). Posisi ini menandakan sebuah usaha yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi ancaman dan kelemahan internal.

Saran

Berdasarkan permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya BUMDes berusaha maksimal dalam meningkatkan usahanya dan juga menggunakan dana operasional dengan maksimal agar BUMDes tidak kehabisan dana. Semakin maksimal tata kelola BUMDes maka akan memberi dampak yang positif untuk desa dan masyarakat sekitar.
2. BUMDes harusnya lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat setempat agar masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes dan segala kegiatan yang dijalankan.
3. BUMDes harusnya memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada agar kelemahan dan ancaman yang ada tidak terlalu membawa dampak buruk terhadap kinerja BUMDes kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D. 2002. Pedoman teknis pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan, IPB.
- Chalid, Nursiah dan Yusbar Y. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi Universitas Riau
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- David, F.R. 2004. *Manajemen Strategis*. Edisi Kesembilan. PT. Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- David, F. R. 2009. *Manajemen Strategis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fedriansyah, A.M. 2008. *Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu, Semarang, UNDIP*.
- Fitri, M. 2006. *Strategi Pengembangan Usaha Sayuran Organik Pada Kelompok Tani "Usahatani Bersama" Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. Skripsi. Program Studi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media.
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. (PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) KARYA MANDIRI SEJATI oleh TEDI KUSUMA).
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*, LkiS, Yogyakarta.
- Nasution Z. 2002. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Purnamasari, H. Dkk. (2016). "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang". *Jurnal Politikom Indonesiana*. 1. (2). 31-42.
- Rangkuti, F., 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Santoso, S. 2014. *SPSS 22 from Essential to Expert Skills*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sidik, F. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* Vol 19 No 2 -p-ISSN 0852-9213, e- ISSN 2477-4693.
- Soerjono, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT. Raja Grafindo. (peranan badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan pendapatan asli desa oleh ade eka kurniawan).
- Sugiyono, 2010. *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data*. *Jurnal. Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Pendidikan Matematika Indonesia.
- Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Pratama
- Supriharyono. 2009. *Konservasi Ekosistem Sumberday Hayati*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 228-229p.
- Umar, H. 2008. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1979
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Bumdes.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Utami, M. S. 2010. *Kebutuhan Dasar dan Perilaku Masyarakat (Studi sosial Masyarakat Pesisir Kota Semarang)*,

Eksplanasi Volume 5 Nomor 1 Edisi
Maret.

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa
Merupakan Otonomi yang Asli,
Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Winengan. 2007. *Masalah Sosial
Masyarakat Pesisir*. [online].
[http://perikanan-
hangtuah.blogspot.com/2011/02/mas-
alah-sosial-masyarakat-pesisir.html](http://perikanan-
hangtuah.blogspot.com/2011/02/mas-
alah-sosial-masyarakat-pesisir.html).

